

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MELALUI KEPEMIMPINAN INKLUSIF DI SEKOLAH

Retno Kusumo Dewi¹, Eko Handoyo², Fathur Rokhman³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang

¹retnokusumodewi@students.unnes.ac.id, ²eko.handoyo@mail.unnes.ac.id

³fathurrokhman@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study examines the transformation of educational policies through inclusive leadership at SMP Dorkas Lasem, a private junior high school in Rembang Regency with a highly diverse student population. The principal implements inclusive leadership to ensure that policies accommodate diversity in religion, ethnicity, economic background, and student interests. The study employs a qualitative descriptive approach, using interviews, observations, and documentation analysis to explore how inclusive leadership influences policy transformation. Findings indicate that several factors support the successful implementation of inclusive education policies, including the principal's competence, teacher collaboration, and parental involvement. However, challenges such as differences in student and teacher backgrounds, parental understanding of inclusivity, and surrounding cultural influences persist. To address these challenges, the school employs strategies such as community learning groups, continuous monitoring, and collaboration with external parties. The study highlights the importance of inclusive leadership in creating a fair and sustainable education system, emphasizing the need for ongoing evaluation and stakeholder engagement.

Keywords: Inclusive leadership, educational policy transformation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi kebijakan pendidikan melalui kepemimpinan inklusif di SMP Dorkas Lasem, sebuah sekolah menengah pertama swasta di Kabupaten Rembang yang memiliki keberagaman tinggi. Kepala sekolah menerapkan kepemimpinan inklusif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mengakomodasi keberagaman dalam hal agama, etnis, latar belakang ekonomi, dan minat peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi guna memahami bagaimana kepemimpinan inklusif memengaruhi transformasi kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif didukung oleh beberapa faktor, seperti kompetensi kepala sekolah, kerja sama tenaga pendidik, serta keterlibatan orang tua. Namun, tantangan tetap ada, seperti perbedaan latar belakang peserta didik dan tenaga pendidik, pemahaman orang tua terhadap inklusivitas, serta pengaruh budaya di lingkungan sekitar. Untuk mengatasi

tantangan tersebut, sekolah menerapkan strategi seperti pembentukan komunitas belajar, pemantauan berkelanjutan, dan kerja sama dengan pihak eksternal. Penelitian ini menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan, serta perlunya evaluasi terus-menerus dan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Kepemimpinan inklusif, transformasi kebijakan pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan nasional di Indonesia merupakan sistem yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta responsif terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian, kebijakan pendidikan di sekolah diharapkan mampu mengakomodasi dinamika sosial, budaya, dan perkembangan global agar tetap relevan dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik. Lebih lanjut, pendidikan berdampak bagi berbagai macam stakeholder dunia pendidikan (kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat).

Dalam konteks kepemimpinan, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7327 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah, kompetensi kepala sekolah mencakup deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek teknis manajerial, tetapi juga harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Dalam hal kebijakan pendidikan, tantangan yang dihadapi sekolah menengah

pertama semakin kompleks, terutama dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif. Keberagaman dalam sekolah, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun kebutuhan khusus peserta didik, menuntut kepala sekolah untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip inklusivitas. Seorang kepala sekolah yang inklusif harus mampu mengakomodasi perbedaan, menciptakan suasana pembelajaran yang adil dan setara, serta memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan kepemimpinan yang inklusif, transformasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dalam menjawab kebutuhan seluruh warga sekolah.

Kepemimpinan inklusif memiliki peran krusial dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan menciptakan sistem yang lebih adil bagi seluruh peserta didik. Kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan inklusif mampu merancang kebijakan yang mengakomodasi keberagaman dan memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terpinggirkan

dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan, kepala sekolah berperan dalam mengurangi ketimpangan yang sering terjadi akibat perbedaan sosial, ekonomi, maupun kebutuhan belajar siswa.

Dalam menyikapi transformasi kebijakan pendidikan, kepala sekolah dengan kepemimpinan inklusif mempertimbangkan berbagai aspek untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bersama. Hal ini mencakup penyusunan strategi kepemimpinan yang adaptif, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengelolaan lingkungan sekolah yang mendukung keberagaman. Kebijakan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga menekankan pada aspek psikososial, keterlibatan komunitas, serta pemberdayaan seluruh elemen sekolah agar tercipta budaya inklusif yang berkelanjutan.

Sekolah menengah swasta sering kali memiliki fleksibilitas lebih dalam merancang kebijakan pendidikan dibandingkan sekolah

negeri, namun mereka juga menghadapi tantangan tersendiri dalam menerapkan kepemimpinan inklusif. Faktor seperti keberagaman peserta didik, keterbatasan sumber daya, serta ekspektasi dari pihak yayasan atau pemilik sekolah dapat menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan merata. Oleh karena itu, kepala sekolah di perlu memiliki strategi kepemimpinan yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan agar kebijakan inklusif dapat diterapkan secara efektif.

Kepemimpinan inklusif memiliki sifat yang terbuka dan fleksibel, memungkinkan pemimpin untuk menerima berbagai pendapat dari beragam pemikiran. Pemimpin inklusif tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mempertimbangkan setiap masukan yang ada untuk menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Dengan keterbukaan ini, kepala sekolah dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidik, sehingga tercipta lingkungan

belajar yang lebih adaptif dan progresif (Purnamaningtyas & Rahardja, 2021).

Lebih dari sekadar keterbukaan, kepemimpinan inklusif juga menekankan pentingnya pelibatan seluruh elemen dalam komunitas sekolah. Kepemimpinan inklusif harus memastikan bahwa setiap warga sekolah, termasuk guru, tenaga kependidikan, siswa, dan bahkan orang tua, memiliki peran dalam pengambilan keputusan (Marina, 2022). Melalui partisipasi yang aktif dari berbagai pihak, kebijakan pendidikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pendidikan.

Melihat peran strategis kepemimpinan inklusif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan partisipatif, penting untuk meneliti bagaimana model kepemimpinan ini dapat menjadi faktor transformasi kebijakan pendidikan. Dengan memahami lebih dalam bagaimana kepemimpinan inklusif memengaruhi pengambilan

keputusan dan implementasi kebijakan, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai kepemimpinan inklusif tidak hanya menjadi relevan dalam kajian akademik, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam dunia pendidikan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

SMP Dorkas adalah salah satu SMP Swasta di Kabupaten Rembang yang terletak di Kecamatan Lasem. SMP Dorkas Lasem merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang memiliki karakteristik keberagaman yang sangat kuat. Keberagaman tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari agama, asal daerah (baik dari dalam maupun luar Lasem), etnis, ekonomi, budaya, hingga minat siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Dengan kondisi ini, sekolah menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana setiap elemen di dalamnya dapat merasa diterima,

dihargai, dan mendapatkan kesempatan yang setara dalam proses pembelajaran.

Dalam menghadapi keberagaman tersebut, kepala SMP Dorkas Lasem menerapkan kepemimpinan inklusif dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Kepemimpinan inklusif yang diterapkan berfokus pada transformasi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga sekolah. Dengan pendekatan ini, kepala sekolah berupaya menciptakan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan akademik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya, sehingga seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara holistik.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh bagaimana bentuk transformasi kebijakan pendidikan di SMP Dorkas melalui kepemimpinan inklusif, apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kepemimpinan

inklusif di SMP Dorkas, dan bagaimana strategi kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan inklusif untuk mendukung kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya kepemimpinan inklusif dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap keberagaman.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Pada pendekatan ini, peneliti menggali secara mendalam dan detail mengenai individu atau kelompok tertentu, sehingga dapat memperoleh gambaran naratif tentang perilaku atau pengalaman yang diamati. Penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. (Safrudin et al., 2023)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya (Fadli, 2021). Jadi penelitian ini mendeskripsikan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan inklusif dalam transformasi kebijakan pendidikan. Teknik pengumpulan data ialah wawancara, observasi dan dokumentasi..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen, hasil observasi, serta wawancara dengan informan yang relevan dengan penelitian. Selain itu, diskusi yang terarah pada permasalahan yang diteliti turut memperkaya analisis dalam bab ini. Secara keseluruhan, bagian ini akan menguraikan berbagai aspek

yang berkaitan dengan bentuk transformasi kebijakan pendidikan melalui kepemimpinan inklusif, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kepemimpinan inklusif di sekolah, serta strategi kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan inklusif untuk mendukung kebijakan pendidikan yang adil dan berkelanjutan.

Bentuk Transformasi Kebijakan Pendidikan melalui Kepemimpinan Inklusif

Kepala SMP Dorkas Lasem memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, baik dari sisi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Dengan jumlah siswa yang relatif kecil, yaitu 45 peserta didik dari kelas 7 hingga kelas 9, serta didukung oleh 6 tenaga pendidik, 1 tenaga administrasi, dan 1 tenaga kebersihan, SMP Dorkas memiliki dinamika tersendiri dalam pengelolaannya. Keunikan lainnya terletak pada lokasi sekolah yang berada di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang dikenal sebagai kawasan dengan

keberagaman budaya. Pengaruh Islam yang kuat dari lingkungan pondok pesantren, budaya Tionghoa yang masih terjaga dengan banyaknya klenteng, serta tradisi Jawa yang lekat dengan adat istiadat seperti Batik Lasem, Wayang Gagrang Lasem, dan Sedekah Bumi, mencerminkan kompleksitas lingkungan sosial yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif.

Keberadaan SD Dorkas dan PAUD Dorkas di sekitar SMP Dorkas menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan konsep kepemimpinan inklusif. Sebagai sekolah yang memiliki kesinambungan dalam jenjang pendidikan, SMP Dorkas dapat mengembangkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya menyesuaikan dengan keberagaman internal sekolah, tetapi juga memperhatikan kesinambungan pembelajaran dari tingkat PAUD hingga SMP. Dengan adanya ekosistem pendidikan yang terintegrasi, kebijakan inklusif dapat lebih mudah diterapkan, terutama dalam membangun budaya sekolah yang menghargai

perbedaan, menjunjung nilai-nilai kebersamaan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua pihak.

Beberapa faktor yang mendorong penerapan kepemimpinan inklusif di SMP Dorkas meliputi latar belakang hidup dan pengalaman kepala sekolah serta warga sekolah, keinginan untuk menciptakan kenyamanan bersama, dan upaya membangun rasa memiliki terhadap sekolah. Selain itu, kepemimpinan inklusif juga didorong oleh semangat menerima perbedaan, penyeteraan ekonomi, serta keberagaman peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dari berbagai aspek seperti agama, etnis, budaya, serta minat dan bakat. Kepemimpinan inklusif terdiri dari sejumlah praktik yang berbeda, termasuk atasan yang termasuk mengadvokasi inklusi pada bawahan atau karyawan, mendidik karyawan, mengembangkan kesadaran kritis, memelihara dialog, proses pengalihan pada keputusan inklusif dan strategi pembuatan kebijakan, dan menggabungkan pendekatan di seluruh bidang (Nurul Aini &

Nugrohoseno, 2022). Dengan mempertimbangkan keberagaman, kepala sekolah menerapkan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh elemen sekolah, sehingga transformasi kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter inklusif dalam lingkungan sekolah.

Kepala SMP Dorkas Lasem telah menjabat sejak tahun 2009 dan telah mengalami berbagai perubahan dalam perjalanan kepemimpinannya. Sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, tanggung jawabnya lebih terbatas pada tugas mengajar dan mendidik siswa di dalam kelas. Namun, setelah menjadi kepala sekolah, tanggung jawabnya semakin besar, tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk seluruh warga sekolah serta perkembangan sekolah secara keseluruhan. Kepemimpinan yang dijalankan berorientasi pada kemajuan sekolah, dengan menekankan kebijakan yang mampu mengakomodasi keberagaman dan memastikan setiap individu

mendapatkan hak yang setara dalam proses pendidikan.

Dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas, berbagai kebijakan sekolah telah diterapkan di SMP Dorkas Lasem. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah sistem pembayaran SPP yang mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, kebijakan libur sekolah juga disesuaikan dengan keberagaman agama siswa, sehingga semua keyakinan mendapat penghormatan yang setara. Kebijakan inklusif juga diterapkan dalam proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi agar lebih berorientasi pada keberagaman kemampuan siswa. Selain itu, sekolah juga memberikan berbagai pelatihan bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pendidikan inklusif, serta menyediakan kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan proyek yang memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengekspresikan bakat dan

minatnya. Tidak hanya itu, SMP Dorkas juga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti komunitas, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan mendukung visi pendidikan yang lebih inklusif.

Dalam memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang yang beragam, mendapatkan akses pendidikan yang setara, kepala sekolah menerapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan menerima perbedaan, baik dalam hal budaya, agama, maupun kemampuan belajar. Guru-guru diberikan pemahaman tentang metode pengajaran yang adaptif agar dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, sekolah juga memberikan fasilitas dan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan, seperti bimbingan akademik dan konseling. Melalui strategi ini, diharapkan setiap peserta didik dapat berkembang

secara optimal dalam lingkungan yang inklusif dan suportif.

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Kepemimpinan Inklusif di Sekolah

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Kompetensi kepala sekolah menjadi kunci utama dalam menjalankan kepemimpinan inklusif, terutama dalam memahami situasi dan kebutuhan keberagaman yang ada di sekolah. Seorang kepala sekolah yang transformatif, adaptif, dan lincah akan mampu merancang serta menyesuaikan kebijakan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, kekompakan tenaga pendidik dan kependidikan juga berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan inklusif. Pemimpin yang inklusif akan menunjukkan penghargaan atas kontribusi orang lain (Sani & Annisa, 2019). Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga

memiliki peran dalam memahami peserta didik tentang pentingnya nilai-nilai inklusivitas. Evaluasi kebijakan yang dilakukan secara kontinu juga menjadi faktor pendorong keberhasilan. Hal ini terjadi karena akan memungkinkan sekolah untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan agar lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Namun, dalam penerapan kepemimpinan inklusif, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah. Salah satunya adalah keberagaman latar belakang peserta didik, baik dari sisi ekonomi, budaya, agama, maupun kemampuan akademik, yang menuntut kebijakan yang fleksibel dan adil bagi semua. Selain itu, latar belakang tenaga pendidik dan kependidikan juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menyamakan visi dan pemahaman terhadap pentingnya inklusivitas dalam pendidikan. Pemahaman peserta didik dan orang tua terhadap konsep inklusivitas juga tidak selalu seragam, sehingga memerlukan pendekatan yang tepat agar

mereka dapat menerima dan mendukung kebijakan sekolah. Faktor budaya di lingkungan keluarga peserta didik juga dapat menjadi hambatan, terutama jika masih ada nilai-nilai yang kurang mendukung keberagaman dan kesetaraan dalam pendidikan.

Untuk mengatasi resistensi dari guru, orang tua, maupun pihak yayasan terhadap kebijakan inklusif, sekolah perlu menerapkan berbagai strategi. Kerja sama yang baik antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan inklusif dipahami dan diterima oleh semua pihak. Selain itu, optimalisasi peran yayasan dalam mendukung kebijakan sekolah juga menjadi langkah yang krusial agar kebijakan yang diterapkan memiliki landasan yang kuat. Pemantauan terhadap kebijakan sekolah oleh yayasan, pengawas sekolah, serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga juga dapat memastikan bahwa implementasi kepemimpinan inklusif berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Laporan berkala dari kepala sekolah mengenai efektivitas kebijakan yang telah

diterapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di sekolah.

Strategi Kepala Sekolah dalam Menerapkan Kepemimpinan Inklusif untuk Mendukung Kebijakan Pendidikan yang Adil dan Berkelanjutan

Untuk menerapkan kepemimpinan inklusif dalam mendukung kebijakan pendidikan yang adil dan berkelanjutan, kepala sekolah mengambil langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu strategi utama adalah mengadakan rapat bersama melalui komunitas belajar, di mana seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dapat berbagi wawasan, pengalaman, serta solusi terkait penerapan kebijakan inklusif. Selain itu, selama perjalanan program, sekolah terus melakukan pemantauan dan pendampingan guna mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari kebijakan yang diterapkan. Evaluasi secara berkala menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa strategi yang dijalankan tetap relevan dan

dapat diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya itu, pelibatan pihak yayasan dalam pengambilan kebijakan juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat dukungan institusional terhadap kepemimpinan inklusif. Perilaku pemimpin yang inklusif akan berdampak pada perasaan berdaya yang dimiliki oleh individu—bukan perasaan aman secara psikologis, sebelum kemudian dapat memunculkan perilaku inovatif (Yusuf & Etikariena, 2023).

Selain keterlibatan internal sekolah, kepala sekolah juga memastikan adanya partisipasi dari orang tua serta pihak eksternal dalam mendukung kebijakan inklusif. Orang tua dilibatkan dalam berbagai diskusi serta program sekolah agar mereka memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya inklusivitas dalam pendidikan. Sementara itu, kolaborasi dengan pihak eksternal juga dijalin untuk mendukung pengembangan minat dan bakat peserta didik. Misalnya, sekolah bekerja sama dengan pengusaha Batik Tulis Lasem lokal dalam memfasilitasi peserta didik yang

memiliki minat di bidang seni dan budaya. Langkah ini tidak hanya mendukung keberagaman minat siswa, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dalam pembelajaran berbasis budaya lokal. Kepemimpinan inklusif bukan hanya konsep, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan inovatif (Naibaho & Siregar, 2023). Selain itu, kepala sekolah juga memastikan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan selalu berorientasi pada prinsip inklusivitas, sehingga setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka.

Sejak diterapkannya kebijakan inklusif di sekolah, berbagai perubahan positif mulai terlihat, baik dari sisi mindset maupun perilaku seluruh elemen sekolah. Guru, peserta didik, dan orang tua semakin memahami pentingnya keberagaman serta menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekolah. Hal ini berdampak pada peningkatan sikap toleransi dan saling

menghormati antar warga sekolah. Selain itu, perilaku dan karakter peserta didik juga mengalami perkembangan yang signifikan, di mana mereka lebih terbuka dalam berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda. Tidak hanya dalam aspek sosial, kualitas lulusan juga menunjukkan peningkatan, terutama dalam hal keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang beragam.

Ke depan, sekolah memiliki harapan besar untuk terus memperkuat kepemimpinan inklusif guna menciptakan lingkungan pendidikan yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Pemimpin inklusif yang menghargai keragaman anggota akan mampu membentuk lingkungan yang mengakomodir kebebasan berekspresi bagi anggotanya sehingga mereka mau bersedia menunjukkan *voice behavior* ketika bekerja (Rohmah et al., 2023). Harapan utama adalah agar kebijakan yang telah berjalan dengan baik dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut. Sikap toleransi antar guru, peserta

didik, serta masyarakat di sekitar sekolah diharapkan semakin kuat, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan sosial. Selain itu, penguatan karakter peserta didik akan terus menjadi fokus utama agar mereka tumbuh menjadi individu yang memiliki empati, rasa keadilan, dan semangat inklusivitas yang tinggi. Dengan menjaga dan meningkatkan kondisi inklusivitas di sekolah, diharapkan SMP Dorkas Lasem dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang adil, setara, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Transformasi kebijakan pendidikan di SMP Dorkas melalui kepemimpinan inklusif diwujudkan dengan berbagai strategi yang menekankan keberagaman dan kesetaraan. Kepala sekolah menerapkan kebijakan yang responsif terhadap perbedaan latar belakang agama, ekonomi, budaya, dan minat peserta didik, tenaga pendidik, serta masyarakat sekitar.

Keberhasilan implementasi kepemimpinan inklusif di SMP Dorkas didukung oleh beberapa

faktor utama, seperti kompetensi kepala sekolah dalam memahami keberagaman, kekompakan tenaga pendidik dan kependidikan, serta peran guru dalam menanamkan nilai-nilai inklusif kepada peserta didik. Dalam hal penerapan kebijakan, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika yang ada, serta kerja sama yang erat antara sekolah, yayasan, dan pihak eksternal guna memastikan keberlanjutan pendidikan inklusif.

Dalam menerapkan kepemimpinan inklusif untuk mendukung kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan, kepala sekolah menerapkan berbagai strategi. Ke depan, sekolah berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan inklusif ini dengan memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Marina, R. (2022). Gaya Kepemimpinan Inklusif Kepala Desa Plawikan Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi COVID-19 (Penelitian di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten). *JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 400.
- Naibaho, M. A., & Siregar, H. (2023). *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Kepemimpinan Inklusif Dalam Proses Pembangunan Komunitas Dengan Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Anak Muda Inclusive Leadership In The Community Development Process: Fostering Youth Participation An. 2(4)*.
- Nurul Aini, A., & Nugrohoseno, D. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Inklusif Terhadap Tekanan Kinerja Dan Suara Tim Melalui Inovasi Tim Sebagai Mediator. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2891–2908. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v>

- 1i12.469
Purnamaningtyas, S. D., & Rahardja, E. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Inklusif Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Perilaku Inovatif Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi JawaTengah). *Diponegoro Journal of Management*, 10(3), 1–12.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- 27(2), 635–637.
Yusuf, M. P., & Etikariena, A. (2023). Perilaku Kerja Inovatif Pada Perusahaan Rintisan: Peran Kepemimpinan Inklusif, Keamanan Psikologis, dan Pemberdayaan Psikologis. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 9(1), 101.
<https://doi.org/10.22146/gamajop.78672>
- Rohmah, Z. N., Etikariena, A., & Salendu, A. (2023). Kepemimpinan inklusif dan voice behavior pada karyawan: Menguji peran budaya inovatif. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 11(2), 172–187.
<https://doi.org/10.30996/persona.v11i2.7837>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sani, F., & Annisa, A. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Inklusif Terhadap Perilaku Inovatif Karyawan Dimediasi Oleh Perceived Organizational Support. *E-Jurnal Manajemen*,